

# Hubungan Indonesia dan Australia dalam Perspektif Hubungan Islam dan Barat: Benturan Peradaban atau Kerjasama?

Rizki Damayanti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Department of International Relations, Universitas Paramadina, Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Date received: 05 February 2023 Revision date: 19 April 2023 Date published: 30 May 2023	Among the relations between two countries which are seen as representing the relationship between Islam and the West is the relationship between Indonesia and Australia, where the relationship between these two close neighboring countries is often clashed with perceptions of the relationship between Islam and the West. In this case, Huntington's thesis, states the <i>Clash of Civilizations</i> , is often still the basis for strengthening the view of many parties that Islamic and Western civilization will never meet in harmony. Contrary to Huntington's thesis, Bassam Tibi put forward an argument regarding the Inter-Civilizational Dialogue which allows opportunities for cooperation between Islam and the West. This article is library research using qualitative methods. Data collection techniques were carried out through document review and literature study. This article finds that Indonesia-Australia relations have complex dynamics, where clashes of civilizations, the phenomenon of Islamophobia, as well as civilizational dialogue, or even cooperation are possible in the course of Indonesia's relations with Australia.
Keywords <i>Islam dan Barat;</i> <i>Indonesia-Australia;</i> <i>benturan peradaban;</i> <i>dialog antar peradaban</i>	
Correspondence Email: <a href="mailto:rizki.damayanti@paramadina.ac.id">rizki.damayanti@paramadina.ac.id</a>	

## PENDAHULUAN

Di awal tahun 1990-an, Samuel P. Huntington dalam tesisnya tentang Benturan Peradaban (*The Clash of Civilizations*), menyatakan bahwa sumber konflik yang mendasar dalam dunia baru ini bukanlah bersifat ideologis atau ekonomi. Hal utama yang dapat membelah umat manusia, sekaligus menjadi sumber konflik global adalah kebudayaan. Perang peradaban diprediksi akan mendominasi dalam peta politik internasional. Huntington juga mengemukakan bahwa konflik-konflik paling penting yang akan terjadi adalah terkait dengan garis kebudayaan yang memisahkan antara peradaban Barat dengan non-Barat. Dalam konteks ini, Huntington kemudian memberikan prediksi bahwa perang dunia berikutnya adalah sebuah perang antar peradaban Islam dengan Barat (Huntington, 2011, pp. 43-44).

Benturan antar peradaban kemudian menjadi topik pembicaraan yang hangat, setidaknya di kalangan intelektual, ilmuwan, dan pengamat (terutama pengamat politik dan kebudayaan global), khususnya pasca 9/11. Peristiwa 9/11 memang mengubah paradigma terhadap ancaman dunia yang tidak lagi berfokus pada aspek tradisional, namun juga non-tradisional seperti isu terorisme. Serangan bunuh diri 9/11 di World Trade Center (WTC) dan di tempat lain pada tahun 2001, memicu Presiden Amerika Serikat (AS) George W. Bush untuk mengeluarkan pernyataan 'perang global melawan teror' (*global war on terror*).

Perjalanan hubungan antara Islam dan Barat memang tidak dapat dipungkiri mengalami pasang surut, yaitu dalam bentuk rivalitas dan konfrontasi, kolaborasi serta akomodasi. Salah satu

fenomena yang menarik untuk dikaji terkait hubungan Islam dan Barat dalam hubungan internasional adalah hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia. Kedua negara ini secara geografis memang bertetangga dekat dan sama-sama berada di kawasan Indo-Pasifik (Adducul, 2018). Akan tetapi, kedekatan geografis ini ternyata tidak didukung oleh banyak karakteristik yang sama. Sebaliknya, satu sama lain digambarkan sebagai berbeda dalam bahasa, budaya, agama, sejarah, etnis, jumlah populasi, sistem politik, hukum dan sosial. Kondisi ini mengakibatkan Indonesia dan Australia sering disebut sebagai "sangat berbeda" ("comprehensively unlike, half a world apart") (Evans & Grant, 1991, p. 184). Dalam perjalanannya, hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dengan Australia, tidak selalu berjalan mulus. Indonesia-Australia dihadapkan pada perspektif hubungan Islam dan Barat yang kerap kali dibenturkan.

Dinamika hubungan Indonesia-Australia ini memang telah banyak ditulis dalam berbagai macam aspek dan sudut pandang, namun mengingat dinamika hubungan Indonesia-Australia masih terus berlanjut – utamanya terkait perspektif hubungan Islam dan Barat – maka penting untuk mengikuti perkembangan dari dinamika yang terus terjadi. Tulisan ini berupaya melihat bahwa walaupun gagasan benturan peradaban terkadang dikritik karena bersifat deterministik atau terlalu simpel, tetapi pada faktanya masih terdapat elemen-elemen yang menunjukkan bahwa perbedaan budaya dan peradaban dapat menciptakan ketegangan jika tidak dikelola dengan bijak. Beberapa elemen yang menjelaskan mengapa gagasan ini masih relevan, diantaranya terkait perbedaan budaya dan agama antara masyarakat yang sering kali masih menjadi sumber potensi konflik. Walaupun terdapat interaksi dan globalisasi, faktanya perbedaan ini tetap memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan identitas kelompok. Dalam era globalisasi pula, hubungan antar negara menjadi semakin kompleks. Sebagai akibatnya, interaksi antar peradaban berpotensi menciptakan ketegangan, terutama jika negara-negara memiliki nilai-nilai yang berbeda. Adanya ketidaksetaraan ekonomi antar negara dan antar peradaban juga dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketegangan. Ketidaksetaraan ini dapat memicu persepsi bahwa benturan antara peradaban terjadi karena ketidakadilan ekonomi. Pada akhirnya, konflik bersifat agama masih sering kali terjadi, dimana dalam hal ini isu agama dapat menjadi pendorong utama terjadinya benturan antar peradaban. Dengan kata lain, isu ini masih relevan dalam beberapa konflik di seluruh dunia.

Secara spesifik, tulisan ini memfokuskan pada hubungan Indonesia-Australia dalam konteks pertemuan Islam dan Barat, bukan berarti bahwa benturan antar peradaban antara Indonesia dan Australia pasti terjadi, melainkan untuk menyoroti kompleksitas hubungan bilateral yang dapat mencakup tantangan dan potensi konflik. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor potensial yang mempengaruhi hubungan antar peradaban, dapat diambil pembelajaran untuk mendorong dialog, saling pemahaman, dan kerjasama yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, tulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian pembahasan. Bagian pertama merupakan definisi konseptual mengenai benturan peradaban dan dialog antar peradaban, yang dilanjutkan dengan penjelasan mengenai hubungan Indonesia dan Australia dalam perspektif hubungan Islam dan Barat. Dua bagian awal ini merupakan fondasi pengetahuan sebelum melanjutkan ke bagian ketiga yang berupaya untuk menjelaskan hubungan Indonesia dan Australia dalam konteks benturan peradaban ataukah kerjasama, sebelum akhirnya ditutup dengan bagian kesimpulan.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka bentuk penelitian ini dilihat dari perspektif sumber data termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan menggunakan berbagai sumber referensi berupa literatur buku-buku, hasil penelitian, publikasi pemerintah, artikel jurnal, surat kabar, catatan internal lembaga, dan situs

internet. Dilihat dari perspektif analisisnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Levy, 2003, p.131). Penelitian ini juga dapat dinyatakan sebagai penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa dinamika hubungan Indonesia dan Australia, khususnya berbagai faktor yang dipandang berperan dalam menentukan arah hubungan yang terjadi di antara kedua negara tersebut.

Pada penelitian ini, juga digunakan pendekatan historis dan politis dalam upaya memahami dinamika hubungan Indonesia dan Australia, termasuk potensi terjadinya benturan peradaban (*the Clash of Civilizations*), sekaligus upaya dialog antar peradaban (*the inter-civilizational dialogue*) di antara Indonesia dan Australia, khususnya dalam perspektif hubungan Islam dan Barat. Oleh karena itu, teori yang akan digunakan pada penelitian ini adalah teori Benturan Peradaban (*The Clash of Civilization*) yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Dialog Antar Peradaban (*The Inter-Civilizational Dialogue*) oleh Bassam Tibi.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Benturan Peradaban (*the Clash of Civilizations*) dan Dialog Antar Peradaban (*the Inter-Civilizational Dialogue*) dalam hubungan Islam dan Barat**

Menurut Samuel P. Huntington, pasca Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya ideologi komunisme atau sosialisme dan yang tinggal kemudian hanyalah kekuatan raksasa tunggal ideologi kapitalisme AS dan sekutunya, maka sumber fundamental dari konflik dalam dunia baru, tidak lagi terletak pada ideologi atau ekonomi, melainkan budaya. Hal paling dominan dalam percaturan dunia adalah terkait konflik politik global, dimana hal yang paling prinsipil akan terjadi antara bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok karena perbedaan peradaban. Benturan antar peradaban ini kemudian akan mendominasi politik global, sehingga peradaban-peradaban yang ada akan menjadi garis-garis pertentangan di masa depan, termasuk masa depan hubungan Islam dengan Barat juga akan menghadapi tantangan yang sangat besar (Huntington, 2011, p. 43).

Dalam mengelompokkan negara-negara ke dalam sebuah tipologi peradaban, Huntington cenderung menitik-beratkan pada konteks budaya serta peradaban, dan mengesampingkan sistem politik atau perkembangan ekonomi dari sebuah negara. Peradaban sendiri dimaknai Huntington sebagai entitas kultural yang mencakup wilayah, komunitas etnis, kebangsaan, dan kelompok religius yang memiliki tingkatan perbedaan yang sangat jelas dalam heterogenitas kultural. Menurut Huntington pula, dalam politik peradaban, pemerintahan dan rakyat dari peradaban non-Barat tidak lagi hanya menjadi objek sejarah atau target dari kolonialisme Barat, tetapi justru menjadi penggerak dan pembentuk dari sejarah (Huntington, 2011, p. 46). Lebih lanjut, Huntington membagi peta peradaban dunia sebagaimana terdapat dalam peta berikut ini:

Gambar 1. Peta peradaban menurut Huntington

Sumber: "The Clash of Civilizations?" dalam *Foreign Affairs*, Vol. 72 No. 3, Council on Foreign Relations

## HUNTINGTON'S CIVILIZATIONAL DIVIDES

Samuel Huntington categorized the world into nine civilizations, arguing that the fault lines between them would shape international relations and serve as the driving force of conflict in the post-Cold War world.



Berdasarkan peta peradaban yang terdapat di dalam Gambar 1 di atas, Huntington menyatakan bahwa terdapat tujuh atau delapan peradaban yang masing-masing akan saling bersaing, yaitu peradaban Barat, Amerika Latin, Ortodoks Slavia, Jepang, Islam, Hindu, Konfusius, dan juga Afrika. Di antara peradaban-peradaban non-Barat tersebut, menurut Huntington, kolusi peradaban Islam-Konfusius adalah yang akan berbenturan dalam tingkat yang paling tinggi dengan peradaban Barat dan dalam hal ini Huntington memprediksi bahwa perang dunia berikutnya adalah sebuah perang antar peradaban Barat dan Islam (Huntington, 2011, p. 53).

Terdapat enam alasan pokok yang dikemukakan Huntington untuk mendukung tesisnya, mengapa benturan peradaban akan menjadi sumber konflik utama di era Pasca Perang Dingin (Huntington, 2011, pp. 61-62):

1. Adalah sebuah kenyataan bahwa perbedaan antar peradaban tidak hanya riil, tetapi juga mendasar. Selama berabad-abad, perbedaan antar peradaban telah menimbulkan konflik yang keras dan lama.
2. Adalah sebuah kenyataan bahwa dunia saat ini semakin menyempit, sehingga interaksi antara orang yang berbeda peradaban menjadi semakin meningkat pula. Kondisi ini, di satu sisi melahirkan rasa kesamaan, tetapi di sisi lain juga mempertajam rasa perbedaan antar peradaban.
3. Proses modernisasi ekonomi dan perubahan sosial dunia telah membuat orang atau masyarakat tercerabut dari identitas lokal, yang pada akhirnya memperlemah negara bangsa sebagai sumber identitas mereka. Dalam konteks ini, agama kemudian muncul sebagai sumber identitas dan pegangan, yang sering kali berwujud gerakan fundamentalis.
4. Adanya peranan Barat yang begitu dominan. Dominasi Barat yang saat ini berada di puncak kekuatan, menimbulkan reaksi dunia non-Barat yang ditandai dengan kemunculan gerakan de-westernisasi dan indigenisasi.
5. Adanya kenyataan bahwa karakteristik dan perbedaan budaya kurang dapat menyatu, sehingga kurang dapat melakukan kompromi bila dibandingkan dengan perbedaan politik dan ekonomi.
6. Kesadaran peradaban bukanlah merupakan *raison d'être* utama terbentuknya suatu regionalisme politik atau ekonomi.

Tesis Huntington yang salah satunya menyatakan bahwa benturan paling keras akan terjadi antara peradaban Barat dengan kolusi peradaban Islam–Konfusius masih menjadi sebuah pertanyaan karena alasan kulturalnya dipandang tidak begitu jelas. Dalam konteks ini, selain alasan ekonomi dan perdagangan, tampaknya tidak ada alasan kultural yang signifikan yang dapat dijadikan asumsi dasar bagi kemungkinan terjadinya kolusi antara negara–negara yang berperadaban Islam dengan negara–negara yang berperadaban Konfusius. Akan tetapi, ketika Huntington melihat peradaban Islam (*Islamic civilization*) sebagai peradaban yang berbenturan paling keras sekaligus sebagai ancaman terbesar bagi peradaban Barat, hal ini dipandang kemungkinan ada benarnya. Jangkauan universal budaya Barat yang Kristen dan Islam, serta kenyataan bahwa Kristen dan Islam merupakan agama yang strict, menjadi landasan yang mendukung pandangan ini.

Secara spesifik, Huntington mengidentifikasi terdapat lima faktor yang menjadi pemicu konflik antara Islam dan Barat (Huntington, 2011, p. 65):

1. Pertumbuhan populasi yang besar di kalangan Muslim telah menimbulkan sejumlah besar masalah pengangguran dan orang-orang muda yang tidak puas yang kemudian memilih untuk direkrut bagi tujuan Islam radikal.
2. Kebangkitan Islam telah memberikan kepercayaan baru kepada umat Islam pada karakter dan nilai khas peradaban Islam dibandingkan dengan nilai-nilai Barat.
3. Upaya simultan Barat untuk menguniversalkan nilai dan institusinya dalam upaya mempertahankan superioritas militer dan ekonomi, serta campur tangan dalam konflik di dunia Muslim telah memunculkan kebencian yang kuat di antara umat Islam.
4. Runtuhnya komunisme menyingkirkan musuh bersama Barat dan Islam, sekaligus meninggalkan ancaman besar yang dirasakan satu sama lain.
5. Meningkatnya kontak dan pembauran antara Muslim dan Barat meningkatkan perasaan tentang identitas masing-masing yang pada akhirnya semakin memperkuat perasaan berbeda dari yang lain.

Meskipun demikian, pandangan Huntington ini ditanggapi secara berbeda oleh Bassam Tibi yang mengajukan argumen yang dipandang sebagai bentuk kontribusinya bagi upaya mengatasi konflik antar peradaban, yaitu melalui dialog antar peradaban (*the inter-civilizational dialogue*). Menurut Tibi, tidak seperti peradaban-peradaban lainnya, peradaban Barat dan Islam memang memiliki potensi konflik yang lebih besar. Dua isu utama yang ada, yaitu politisasi agama dan dampak negatif globalisasi, memperburuk potensi konflik yang mungkin terjadi di antara kedua peradaban ini. Tibi merujuk politisasi agama – yang dalam hal ini ditandai dengan kemunculan semangat pendirian negara Islam – mendorong terjadinya klaim politik yang mengatas-namakan kebenaran ilahi. Dalam konteks ini, “politik agama” menyajikan konflik-konflik itu sebagai hal yang tidak dapat dinegosiasikan karena nilai-nilai yang mereka dukung dipahami sebagai kebenaran ilahi. Sementara globalisasi kemudian bukan dilihat sebagai keberadaan dunia dalam konteks sebuah desa buwana (*global village*), tetapi justru lebih dipandang sebagai kumpulan dari banyak peradaban dengan nilai-nilai yang saling bertentangan. Dalam upaya mengatasi konflik inilah, menurut Tibi, peradaban harus mengakhiri "perang ide" (*war of ideas*) dan mengembangkan dialog antar peradaban yang berdasarkan pada rasa saling menghormati dan menjunjung nilai-nilai bersama, termasuk demokrasi dan hak asasi manusia (Tibi, 2012, p. 169).

Terkait keberhasilan pencapaian dialog antar peradaban, Bassam Tibi menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya benturan peradaban dalam skala luas dan sekaligus menumbuhkan dialog antar peradaban yang fungsional, maka diperlukan analisis tentang konflik berdasarkan nilai (*value-based conflict*) di antara unsur-unsur tertentu di antara peradaban yang berbeda (Tibi, 2012, p.203).

Secara spesifik, Bassam Tibi menyatakan bahwa dalam upaya menghasilkan dialog yang bermanfaat, maka harus dapat ditentukan hal-hal apa saja yang memecah-belah dan yang mempersatukan. Agama politik, yaitu fundamentalisme pada pihak Islam, dan hegemoni budaya dan politik pada pihak Barat dapat diidentifikasi sebagai hal-hal yang menjauhkan kedua peradaban ini. Namun sebaliknya, alih budaya dan dialog antar peradaban yang berlandaskan rasionalitas dan moralitas internasional jelas merupakan hal yang dapat menjadi pemersatu kedua peradaban ini.

Sejalan dengan konsepsi Bassam Tibi di atas, maka penting untuk melakukan upaya mengidentifikasi isu-isu atau faktor-faktor apa saja yang berpotensi memecah-belah dan yang mempersatukan perjalanan hubungan bilateral Indonesia-Australia. Dalam konteks ini, terdapat tiga isu atau faktor utama yang berperan menjadi pemersatu dalam perjalanan hubungan Indonesia-Australia, yaitu urgensi kerja sama kontra-terorisme, tantangan meningkatnya peran *China* di kawasan Indo-Pasifik, serta kepentingan penguatan kerja sama ekonomi. Sementara, fakta sebagai sesama negara multikultural justru adalah jalan yang paling memungkinkan untuk melibatkan publik luas melalui diplomasi multi-jalur, yang salah satunya dapat ditempuh melalui upaya dialog antar peradaban.

### **Hubungan Indonesia dan Australia dalam perspektif hubungan Islam dan Barat**

Dalam studi Hubungan Internasional, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia bukan hanya dipandang sebagai hubungan bilateral antara dua negara, tetapi lebih dari itu menggambarkan dan mewakili hubungan Islam dan Barat. Hal ini berlandaskan pada fakta bahwa sebagai sebuah negara yang secara geografis sebetulnya lebih dekat ke Asia daripada Eropa, Australia justru lebih sering dinyatakan sebagai a western nation “trapped” in Asia (bangsa Barat yang “terjebak” di Asia). Bila ditelaah, secara geografis Australia merupakan bagian dari benua Oseania dan berada di lempeng tektonik yang terpisah dari Asia (Leung & Lin, 2016). Itulah mengapa ketika membicarakan Australia, seringkali tidak dimasukkan sebagai bagian dari Asia, tetapi Australia dimasukkan sebagai bagian integral dari kawasan Indo-Pasifik atau Asia-Pasifik yang juga dikenal sebagai Apac. Istilah ini kemudian secara konsisten digunakan ketika membahas perdagangan, keuangan, olahraga, dan politik yang menyangkut Australia.

Secara politis, Australia merupakan bekas jajahan Inggris yang merupakan bagian dari Negara-Negara Persemakmuran (Commonwealth of Nations) dan meskipun merupakan negara yang berdaulat, Australia tetap mengakui Ratu/Raja Inggris sebagai raja mereka. Secara ekonomi, Australia merupakan negara dengan ekonomi terbesar ke-13 di dunia dan memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita terbesar ke-9 di dunia, lebih tinggi dibandingkan Inggris, Jerman, Prancis, Kanada, Jepang dan AS (UNDP, 2018). Dari sisi agama, meskipun Australia tidak memiliki agama nasional yang resmi dan rakyat bebas memeluk agama apapun yang mereka pilih, tetapi Australia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Kristen, yaitu sekitar 64% dari keseluruhan penduduk Australia (Kedutaan Besar Australia, 2018).

Dari sisi budaya dan sistem pemerintahan, Australia sangat dipengaruhi dan sangat terkait dengan Eropa. Sejarah mencatat, baru pada tahun 1901 Australia merdeka dari Inggris dan menghapus White Australia Policy, yaitu sebuah kebijakan yang melarang warga negara non-Eropa bermigrasi ke Australia. Bahkan saat ini, lebih dari 90% penduduknya adalah keturunan Eropa (Nurdin, 2009, p. 29). Itulah pula sebabnya meskipun banyak pendapat yang menyatakan bahwa penduduk asli Australia adalah suku Aborigin, yang awalnya bermigrasi dari Asia, tetapi faktanya persentase populasi mereka sangat kecil.

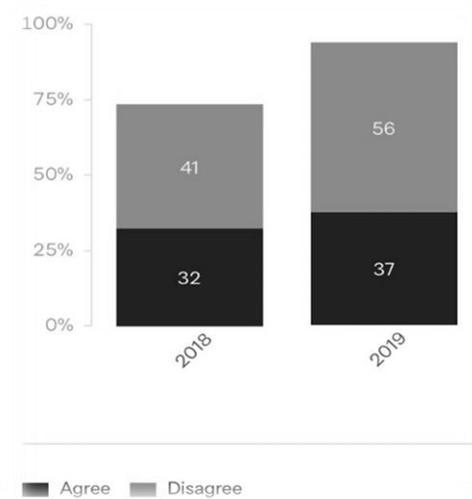
Australia juga merupakan bagian dari aliansi yang dibangun oleh AS, Inggris, Kanada dan negara Barat lainnya. Sebagai catatan, Australia merupakan anggota dari Five-Eyes (FVEY) yang merupakan aliansi intelijen dengan AS, Inggris, Kanada dan Selandia Baru. Australia juga menjadi negara mitra global Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO) dan sejak tahun 1951 Australia bersama-sama dengan AS dan Selandia Baru membentuk aliansi pertahanan dan keamanan di kawasan Pasifik melalui Australia, New Zealand, United States Security Treaty (ANZUS), sekaligus merupakan negara yang berada di bawah payung keamanan AS, yaitu melalui The US Nuclear Umbrella dan The United States Force Posture Initiatives (USFPI). Di samping itu, Australia merupakan bagian dari The Quad atau yang secara resmi disebut the Quadrilateral Security Dialogue yang merupakan aliansi dari empat negara, yaitu AS, Australia, India, dan Jepang, terkait kerjasama penanganan masalah keamanan, ekonomi, dan Kesehatan (Kutty & Basrur, 2021). Perkembangan mutakhir adalah bergabungnya Australia, United Kingdom, dan United States of America (AUKUS) yang merupakan pakta pertahanan terkait pengembangan bersama dari pembangkit listrik tenaga nuklir, khususnya pembangunan kapal selam bertenaga nuklir (Fullilove, 2022).

Di sisi lain, jika didasarkan pada peta geografis dunia saat ini, dapat dinyatakan bahwa dunia Islam berada di antara China, Korea, dan Jepang pada sisi timur dan Eropa pada sisi Barat, antara Rusia di bagian utara dan sub-Sahara Afrika dan Australia di bagian Selatan. Yang dimaksud dengan dunia Islam adalah bagian bumi yang mayoritas ditempati oleh masyarakat yang memeluk agama Islam, terbentang dari Maroko di ujung barat hingga Indonesia di ujung timur, Rusia di bagian utara hingga Comoro di lautan India bagian selatan. Dari fakta geografis ini pula, maka dapat dikatakan Dunia Islam sebagai bangsa tengah (middle nation) (Bakar, 2003, p. 45). Fakta lainnya, meskipun Indonesia terletak jauh dari negara-negara jazirah Arab yang mayoritas beragama Islam, tetapi Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Berlandaskan pada uraian ini, maka Indonesia kemudian dapat dinyatakan sebagai negara yang mewakili peradaban Islam.

Dalam perjalanannya, hubungan bilateral yang terjalin antara Australia dengan Indonesia, tidak selalu berjalan mulus. Kekhawatiran terbesar yang sering diungkapkan oleh masyarakat Australia adalah terkait ancaman yang menurut mereka mungkin akan dihadapi Australia suatu hari nanti, yaitu munculnya ancaman dari sebuah negara di sebelah utara Australia dengan populasi lebih dari 271 juta dimana mayoritasnya adalah Muslim. Masyarakat Australia menyebut Indonesia sebagai “terlalu banyak, terlalu dekat” (“too many, too close”). Kekhawatiran ini juga diperkuat dengan adanya pandangan bahwa Indonesia sangat berbeda dengan Australia dalam banyak hal dan karenanya menjadi sebuah negara-bangsa yang dirasa teramat asing (Mackie, 2007, p. 16).

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Lowy Institute pada tahun 2018 dan 2019 terkait pandangan masyarakat Australia mengenai keterkaitan antara Indonesia dengan terorisme, menyatakan bahwa meskipun terdapat peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi isu terorisme, tetapi hasil jajak pendapat tersebut masih cukup besar menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat Australia bahwa Indonesia tidak berkorelasi dengan terorisme.

Gambar 2. Peta hasil *polling* kepada warga Australia terkait Indonesia dan terorisme  
Sumber: Lowy Institute Poll 2020 (Lowy Institute for International Policy).



Gambar diagram 2 di atas menunjukkan bahwa meskipun di tahun 2019 semakin besar jumlah masyarakat Australia, yaitu 56%, yang tidak sependapat bahwa Indonesia berkorelasi dengan terorisme, tetapi jumlah yang berpendapat sebaliknya masih cukup besar (37% responden).

Dalam konteks konflik global dunia Islam kontemporer, Australia memandang ancaman terorisme di Asia Tenggara seperti di Indonesia, Malaysia dan Filipina Selatan akan meningkat karena adanya hubungan antara ekstremis lokal dengan kelompok teroris seperti The Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) (Australian Foreign Policy White Paper 2017, p. 69). Konflik dan kekerasan yang terus berlangsung di beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika, termasuk ketegangan geopolitik antara Iran dan beberapa negara Teluk yang pada akhirnya akan ikut memicu konflik di beberapa negara di Timur Tengah, juga dipandang mempengaruhi kepentingan keamanan Australia yaitu melalui potensi ancaman terorisme dan migrasi pengungsi konflik. Sementara dalam konflik Israel-Palestina, Australia menyatakan bahwa Israel merupakan mitra penting bagi Australia yang ditandai bukan hanya dengan terjalinnya hubungan bilateral antara Australia-Israel, tetapi juga didukung oleh hubungan antar-warganya. Bagi Australia, keamanan Israel akan tetap menjadi fokus perhatian utama. Australia di bawah pemerintahan Perdana Menteri (PM) Scott Morrison bahkan kemudian mengikuti langkah AS untuk secara resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel (Blaxland, 2021).

Beranjak dari sini, ketegangan di antara Indonesia dan Australia kemudian meningkat, khususnya ketika PM Morrison menyatakan rencana Australia untuk memindahkan kedutaan Australia di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Retno Marsudi menyebut Australia akan menyalahi aturan internasional jika pemindahan itu dilakukan. Perpindahan kedutaan ini menjadi hal penting karena berarti Australia mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, padahal kota itu masih dalam sengketa antara Israel dengan Palestina yang sama-sama ingin menjadikannya sebagai ibukota (Nabbs-Keller, 2020). Kebijakan Australia ini dipandang sebagai sebuah langkah dalam upaya mengikuti kebijakan AS yang sudah lebih dulu memindahkannya ke Yerusalem.

### **Hubungan Indonesia dan Australia: Benturan Peradaban atau Kerjasama?**

Hubungan Indonesia dengan Australia memang mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Selama perjuangan kemerdekaan Indonesia atas Belanda, Australia menunjukkan

dukungannya bagi Indonesia. Dukungan ini terus berlanjut ketika Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada Agustus 1945 hingga masa-masa awal kemerdekaan Indonesia direntang tahun 1945-1959. Awal hubungan kedua negara ini ditandai dengan tercapainya kerjasama dan optimisme yang tinggi. Hubungan ini kemudian mengalami perkembangan ke arah yang semakin positif di awal tahun 1990-an yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan terjadinya lonjakan besar pertama dalam investasi Australia ke Indonesia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hubungan pribadi yang erat yang berkembang antara PM Paul Keating dan Presiden Soeharto juga ikut berkontribusi besar pada meningkatnya hubungan tersebut (Mackie, 2007, p. 29).

Ketegangan di antara Indonesia-Australia dalam fase berikutnya, diawali dengan krisis keuangan (financial meltdown) Asia Timur pada tahun 1997-1998 yang menyebabkan jatuhnya investasi Australia di Indonesia (selain sektor pertambangan) dan kemudian mendorong pergeseran aliran modal asing Australia menuju *China*. Ketegangan politik akut kemudian berkembang di antara kedua negara pada tahun 1999 akibat peran Australia yang dianggap mendukung perjuangan kemerdekaan Timor-Timur dari Indonesia. Meskipun hubungan antara Indonesia-Australia masih tetap berjalan baik setelah keterlibatan Australia di Timor-Timur, tetapi kemudian muncul ketegangan baru, yaitu terkait isu teroris Muslim yang ditandai dengan menguatnya perang melawan teror global yang diusung oleh AS dengan dukungan North Atlantic Treaty Organization (NATO), termasuk Australia.

Pasang-surut yang terjadi pada hubungan bilateral Indonesia-Australia sebetulnya sering dipandang sebagai akibat adanya perbedaan budaya dan kepentingan yang mencolok di antara kedua negara. Faktor perbedaan ini kemudian menjadi landasan dalam proses pembuatan dan arah politik luar negeri Indonesia maupun Australia. Sebagai contoh, bagi Indonesia dalam menanggapi isu perang global melawan teror, menjadi penting untuk melakukan upaya yang bertujuan melawan persepsi Barat yaitu menunjukkan bahwa sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia bukanlah ancaman atau tempat berkembangnya dasar untuk tujuan ekstremisme (Rahmawati, 2017, p. 57). Itulah sebabnya, pemerintah Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dengan sigap menggunakan narasi dalam diplomasi publiknya, yaitu menjelaskan bahwa Islam, demokrasi, dan masyarakat modern dapat hidup berdampingan secara damai. Hal ini menjadi penting, bukan hanya sejak sebelum Perang Teluk pertama, tetapi bahkan menjadi teramat penting dalam periode pasca 9/11, selama Arab Spring/Winter, juga terkait aksi teror Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Indonesia kemudian berupaya menghadirkan wajah alternatif Islam kepada negara-negara Barat sekaligus mempertahankan citra internasionalnya sebagai negara Muslim moderat. Sementara dari sisi Australia, sepanjang sejarah hubungan diplomatik Indonesia-Australia, Islam sebetulnya tidak diberikan porsi besar dalam diplomasi Australia terhadap Indonesia. Hingga kemudian isu terorisme mencuat di awal tahun 2000-an, khususnya setelah terjadinya peristiwa Bom Bali I pada Oktober 2002 yang menimbulkan 88 korban warga Australia, Islam kemudian menjadi elemen penting dalam hubungan diplomatik Indonesia-Australia (McDougall, 2018).

Dalam perkembangannya, Indonesia dan Australia kemudian berupaya untuk mengatasi potensi benturan yang ada, sekaligus menjalin kerjasama yang saling menguntungkan serta mengakomodir kepentingan kedua negara. Di antara mekanisme yang dikembangkan sebagai media hubungan utama di antara kedua negara adalah Dialog 2+2, Pertemuan Para Pemimpin Tahunan (the Annual Leaders Meeting/ALM) dan Dialog Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Dialogue/IAD). Dialog 2+2 merupakan Forum Menteri Luar Negeri dan Pertahanan kedua negara yang pertama kali diadakan di Canberra pada tahun 2012, yang ditujukan untuk bersama-sama membahas isu-isu

strategis di tingkat bilateral, regional dan global. Forum ini juga digunakan untuk memajukan kerja sama dalam membina stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di Kawasan (Hudson & Anwar, 2021).

Upaya kedua negara untuk memperkuat hubungan diplomatik juga semakin terlihat kuat dalam beberapa tahun berikutnya. Interaksi yang melibatkan elit pemerintah, kelompok bisnis, dan masyarakat umum terus meningkat. Hal ini juga ditandai dengan ritual yang dilakukan pemimpin Australia, dimana setiap kali Perdana Menteri Australia yang baru diangkat, Indonesia menjadi negara tujuan pertama kunjungan kenegaraannya. Situasi tersebut bertolak belakang dengan tradisi lama yang lebih memilih London atau Washington sebagai tujuan kunjungan kenegaraan pertama dari pemimpin Australia terpilih. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Australia pada tahun 2017 dan kunjungan PM Scott Morrison ke Indonesia pada Agustus 2018 yang kemudian diikuti dengan selesainya perundingan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership/IA-CEPA) dapat dinyatakan sebagai fase penting dalam memperkuat hubungan kedua negara. Kedua pemimpin bahkan sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif (Comprehensive Strategic Partnership/CSP) (Australian Government, 2021). Lebih lanjut, pidato Presiden Joko Widodo di hadapan parlemen Australia pada bulan Februari 2020 dipandang ikut memberikan implikasi lebih pada upaya penguatan hubungan kedua negara (Greenless, 2020).

Dalam forum Dialog 2+2 yang ketujuh pada tanggal 9 September 2021, Menlu RI Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo mengadakan pertemuan dengan Menlu Australia Marise Payne dan Menhan Australia Peter Dutton. Secara spesifik, pertemuan ini digelar untuk membahas berbagai potensi kerjasama dan tantangan yang harus dihadapi bersama oleh kedua negara. Pertemuan tersebut membahas berbagai hal, mulai dari upaya untuk memastikan akses yang sama dan adil terhadap vaksin Covid-19, pemulihan kondisi ekonomi pasca-pandemi hingga kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan, dinamika di kawasan Indo-Pasifik, termasuk situasi di Myanmar dan Afghanistan yang juga menjadi perhatian utama kedua negara (Leung, 2021).

Dengan berdasarkan pada semangat persahabatan, kemitraan, dan prinsip-prinsip Perjanjian Lombok (The Lombok Treaty) 2006, pertemuan keempat menteri ini kemudian menghasilkan Pernyataan Bersama (Joint Statement) yang berisikan komitmen yang telah disepakati. Pertemuan ini membawa sejumlah kemajuan penting bagi hubungan kedua negara. Kesepakatan tersebut antara lain memperkuat kerja sama pertahanan dalam penanggulangan terorisme dan ekstremisme, memperkuat kerja sama di bidang keamanan siber, menandatangani pembaruan Defense Cooperation Arrangement (DCA), termasuk menyepakati untuk memberikan kesempatan bagi taruna Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di akademi militer Australia. Kerjasama dalam bentuk pelatihan taruna Indonesia di Australia ini akan menjadi yang pertama kali dalam sejarah hubungan kerjasama kedua negara (Strangio, 2021).

Dalam perkembangannya, Indonesia maupun Australia juga menyadari, saat ini berada di wilayah yang berkembang sangat dinamis sehingga menuntut peninjauan kembali politik luar negeri yang dijalankan oleh kedua negara. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa dinamika di kawasan regional akan ikut mempengaruhi masa depan hubungan Indonesia-Australia. Isu-isu regional dapat menjadi faktor yang menjadi sumber masalah dalam hubungan kedua negara, tetapi juga dapat menjadi faktor pendorong bagi kedua negara untuk memperkuat kerja sama bilateral.

Di satu sisi, Australia-Indonesia telah mengalami berbagai pasang surut dalam hubungan bilateral mereka, tetapi di sisi lain juga mencatat perkembangan hubungan bilateral yang cukup baik di berbagai bidang, diantaranya kerjasama perdagangan yang cukup baik meskipun kedua negara

bukan mitra dagang utama; bidang pariwisata dimana Australia merupakan sumber wisatawan yang signifikan bagi Indonesia; kerjasama dalam penanggulangan terorisme di antara kedua negara yang dianggap sebagai salah satu kerjasama terbaik di dunia; dan kerjasama pendidikan dan kebudayaan yang terus berjalan. Bahkan saat ini, hubungan perdagangan berpotensi untuk berkembang semakin baik yang ditandai dengan penerapan IA-CEPA, serta adanya indikasi terganggunya hubungan antara Australia dan China. Beranjak dari hal ini, maka hubungan bilateral Indonesia-Australia tidak dapat hanya dibangun dengan mempertimbangkan keuntungan bagi kepentingan nasional yang pragmatis, tetapi kedua negara juga harus menanggapi kepentingan strategis yang lebih luas, terutama terkait fakta bahwa Indonesia-Australia berada di kawasan strategis yang saat ini menjadi objek perebutan pengaruh antara dua raksasa dunia, yaitu AS dan China (Troath, 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, tatanan kawasan Indo-Pasifik juga telah menjadi salah satu agenda penting dalam setiap pertemuan antara pemimpin dan pejabat Indonesia dan Australia. Dengan kata lain, Indonesia berkepentingan untuk menjaga hubungan dengan Australia agar upaya mencapai konvergensi mengenai konsep Indo-Pasifik dapat terus berlanjut, terutama setelah penandatanganan pakta pertahanan AUKUS antara Australia, Inggris dan AS pada 15 September 2021. Terkait hal ini, Kemlu RI melalui penjelasan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara pertama di kawasan yang mengingatkan Australia tentang kewajibannya untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Di samping itu, Indonesia juga menekankan kembali kewajiban negara lain untuk senantiasa respek atau menghormati hukum internasional (Hakim, 2021).

Australia sendiri mengakui secara tegas posisi Indonesia sebagai kekuatan penting, yaitu dengan menempatkan Indonesia pada posisi yang setara dengan India dan Jepang. Australia menyatakan ketiga negara ini penting karena dianggap memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tatanan kawasan. Australia juga tidak dapat mengabaikan posisi Indonesia jika ingin tampil sebagai salah satu kekuatan paling berpengaruh di kawasan. Kondisi ini kemudian menempatkan Indonesia-Australia pada posisi yang saling membutuhkan demi kepentingan strategis di kawasan Indo-Pasifik. Keinginan bagi terwujudnya kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, berdasarkan aturan internasional dan inklusif menjadi landasan penting bagi pandangan bersama kedua negara dalam menyikapi berbagai permasalahan yang dihadapi (Parameswaran, 2020).

Sementara terpilihnya PM Anthony Albanese pada 21 Mei 2022 sebagai kepala pemerintahan Australia yang baru, dipandang bukan hanya berdampak secara signifikan terhadap perpolitikan di dalam negeri Australia, tetapi juga pada bidang politik luar negerinya. Salah satu hal yang menarik untuk dikaji adalah masuknya dua tokoh Muslim dalam jajaran kabinet Albanese menjadi Muslim pertama dalam sejarah kementerian Australia, yaitu Ed Husic sebagai Menteri Industri dan Sains, dan Anne Aly sebagai Menteri Pendidikan Anak Usia Dini dan Pemuda. Demikian pula halnya dengan bergabungnya Fatima Payman sebagai wanita Muslim berjilbab pertama sebagai Senator Australia, dinilai sebagai sebuah langkah sekaligus sinyal kepada dunia tentang peningkatan representasi Muslim dalam politik di Australia (Stayner, 2022).

Terpilihnya Albanese dan kembali berkuasanya Partai Buruh juga mengindikasikan adanya pengaturan ulang strategis (strategic reset) dalam kebijakan luar negeri Australia terhadap kawasan dan isu-isu internasional lainnya. Kunjungan PM Albanese ke Indonesia juga dinyatakan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Australia dalam mengoreksi kebijakan luar negerinya terhadap Indonesia. Mengingat hubungan yang sangat dinamis antara Indonesia dan Australia sebagai dua negara besar yang bertetangga dekat secara geografis, strategic reset ini akan sangat berdampak terhadap Indonesia dan kawasan di masa depan (Centre for Strategic and International Studies, 2022).

PM Albanese sendiri dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo menyatakan keinginan untuk memperkuat hubungan dengan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), terutama dalam menyikapi persaingan geopolitik di Pasifik, sekaligus menggarisbawahi pentingnya Indonesia bagi Australia (CNBC, 2022).

Penguatan kerja sama Indonesia-Australia memang tidak memberikan jaminan secara penuh bahwa pasang-surut hubungan kedua negara tidak akan terulang kembali. Namun, kedua negara ini sebenarnya saling membutuhkan, terutama dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis. Oleh karena itu, keberhasilan dan manfaat dari penguatan hubungan bilateral ini juga tidak dapat diukur dengan substansi yang terbatas pada nilai peningkatan perdagangan, jumlah bantuan kemanusiaan yang diberikan, atau kerjasama dalam bidang pendidikan dan latihan militer yang dilakukan. Sebaliknya, sejauhmana kedua negara mampu menyelaraskan pandangannya dalam mengelola isu-isu di kawasan Indo-Pasifik akan lebih menggambarkan keberhasilan penguatan hubungan Indonesia-Australia (Nabbs-Keller, 2020). Dasar pandangan atas kondisi ini seolah terwakili oleh sebuah diktum terkenal yang dikemukakan oleh Joseph Rudyard Kipling terkait hubungan Barat dan Timur, bahwa “Timur adalah Timur, Barat adalah Barat, dua belahan ini tidak akan pernah bertemu” (Swasono, 2015, p. 30). Timur yang dimaksud adalah mewakili dunia Islam, sedang Barat mewakili dunia non-Muslim. Meski kerjasama peradaban dapat terjalin, Kipling menyatakan bahwa kerjasama itu berdasarkan pada kepentingan masing-masing, dan kerjasama yang dijalin atas dasar kepentingan, tidak akan bersifat abadi. Dengan kata lain, kelanggengan hanya terjadi sejauhmana kepentingan masing-masing dapat terakomodir.

Dalam konteks hubungan Indonesia-Australia, maka diperlukan sebuah strategi yang kuat sebagai dasar bagi kerjasama yang berkelanjutan dan terdapat dua variabel yang memungkinkan kondisi ini terjadi, yaitu konsistensi dan rasa hormat. Konsistensi kebijakan tersebut harus didasarkan pada saling apresiasi di antara para elit kebijakan luar negeri di kedua negara, terutama terkait pemahaman arti penting keberhasilan hubungan tersebut untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran dalam tatanan transisi Indo-Pasifik. Indonesia yang mengedepankan sentralitas ASEAN bersama Australia dan negara-negara kekuatan menengah (*middle power*) lainnya berpeluang menciptakan multilateralisme di kawasan Indo-Pasifik tanpa adanya dominasi satu negara adidaya. Hal ini menjadi nilai terpenting dalam mempererat hubungan antara Indonesia dan Australia, dimana penguatan kerja sama dan kemitraan bilateral Indonesia-Australia pada akhirnya juga akan memberikan arti penting bagi kerja sama yang lebih luas antar negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Patut pula digarisbawahi bahwa hubungan diplomatik Indonesia dengan Australia pada kenyataannya telah terjalin selama lebih dari 70 tahun, yang ditandai dengan disepakatinya CSP dengan tujuan menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang damai, sejahtera, dan kuat (Australian Government, 2021). Dengan kata lain, kedua negara berupaya untuk menciptakan hubungan bertetangga-baik (*good neighbor policy*) serta menerapkan strategi politik luar negeri yang relevan dalam upaya mencegah konflik nyata antara Indonesia dengan Australia.

## KESIMPULAN

Hubungan antara Indonesia dan Australia dalam perspektif hubungan Islam dan Barat melibatkan dinamika yang kompleks. Meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam hal budaya, agama, dan sejarah, tetapi fakta menunjukkan bahwa terdapat peluang besar untuk mengarahkan hubungan ini ke arah kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam hal ini, kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Australia menjadi salah satu poin penting dalam hubungan bilateral ini. Investasi saling menguntungkan dan pertumbuhan perdagangan menunjukkan bahwa kedua negara memiliki kepentingan yang signifikan dalam membangun kemitraan ekonomi yang kuat. Kerjasama di bidang

keamanan dan pertahanan juga mencerminkan keinginan bersama untuk menjaga stabilitas di kawasan. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan budaya dan nilai-nilai, kedua negara mengakui pentingnya bekerjasama untuk mengatasi tantangan keamanan bersama.

Di sisi lain, tantangan dan potensi benturan antar peradaban, tetap ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam mengelola perbedaan dan memperkuat upaya-upaya diplomasi. Dialog antar peradaban, membangun saling pemahaman, dan kesediaan untuk menyelesaikan potensi konflik melalui jalur diplomatik dapat memainkan peran kunci dalam meredakan potensi ketegangan. Dengan kata lain, meskipun terdapat potensi benturan antar peradaban, hubungan Indonesia-Australia dapat berkembang ke arah kerjasama yang lebih erat melalui pendekatan yang inklusif, dialogis, dan saling menghormati.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adducul, Lloyd Alexander. (2018). "The Indo-Pacific Construct in Australia's White Papers: Reflections for ASEAN-Australia Future Strategic Partnership". CIRSS Commentaries, 18 (6). Center for International Relations and Strategic Studies. <https://fsi.gov.ph/the-indo-pacific-construct-in-australias-white-papers-reflections-for-asean-australia-future-strategic-partnership/>
- Australian Government. (2017). "Australian Foreign Policy White Paper 2017". Diakses pada 7 Agustus 2021. <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/2017-foreign-policy-white-paper.pdf>
- Australian Government. (2020). "Joint Declaration on a Comprehensive Strategic Partnership between Australia and the Republic of Indonesia". Diakses pada 5 September 2021. <https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/Pages/joint-declaration-comprehensive-strategic-partnership-between-the-commonwealth-of-australia-and-republic-of-indonesia>
- Bakar, Osman. (2003). Islam dan Dialog Peradaban. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Blaxland, John. (2021). "Imagining Sweeter Australia-Indonesia Relations". Journal of Global Strategic Studies, 01(01). Diakses pada 12 Februari 2022. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/JGSS/article/view/572/237>
- Centre for Strategic and International Studies. (2022). "Proyeksi Hubungan Indonesia-Australia di Era Kepemimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese". CSIS Media Briefing. Diakses pada 22 Juli 2022. <https://www.csis.or.id/events/media-briefing-proyeksi-hubungan-indonesia-australia-di-era-kepemimpinan-perdana-menteri-anthony-albanese>
- CNBC. (2022). "Australia's Prime Minister in Indonesia for Talks on Investment and Climate Change". Diakses pada 22 Juli 2022. <https://www.cnbcm.com/2022/06/06/australian-pm-anthony-albaneses-visit-to-indonesia.html>
- Evans, Gareth & Bruce Grant. (1991). Australia's Foreign Relations in the World of the 1990s. Melbourne: Melbourne University Press.
- Fullilove, Michael. (2022). "America and Australia are Back on the Same Page: How Biden Revived the Alliance". Foreign Affairs. Diakses pada 14 Februari 2022. <https://www.foreignaffairs.com/articles/australia/2022-02-11/america-and-australia-are-back-same-page>
- Greenless, Donald. (2020). "Australia-Indonesia Relations During and After Pandemic: 30 Years of

Insights Capabilities & Connections”, Asialink. Diakses pada 17 Januari 2022. [https://asialink.unimelb.edu.au/\\_\\_data/assets/pdf\\_file/0010/3509731/Australia-Indonesia-Relations-During-and-After-Pandemic-a-Parliamentary-Submission.pdf](https://asialink.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0010/3509731/Australia-Indonesia-Relations-During-and-After-Pandemic-a-Parliamentary-Submission.pdf)

- Hakim, Chappy. (2021). “Apa yang Dapat Dilihat dari Pembentukan AUKUS?” Kompas. Diakses pada 6 Februari 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/17/18483011/apa-yang-dapat-dilihat-dari-pembentukan-aucus?page=all>
- Hudson, Andrew & Dewi Fortuna Anwar. (2021). “Time to Strengthen Australia-Indonesia Partnership”. The Jakarta Post. Diakses pada 15 Februari 2022. <https://www.thejakartapost.com/academia/2021/09/07/time-to-strengthen-australia-indonesia-partnership.html>
- Huntington, Samuel P. (2011). *The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order*. Simon & Schuster.
- Kedutaan Besar Australia. (2018). “Kebebasan Beragama”. Diakses pada 29 Desember 2020. [https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/kebebasan\\_beragama.html](https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/kebebasan_beragama.html)
- Kutty, Sumitha Narayanan & Rajesh Basrur. (2021). “The Quad: What It Is and What It Is Not. The Quad is No Asian NATO and That May Be Its Greatest Strength”. The Diplomat. Diakses pada 4 Januari 2022. <https://thediplomat.com/2021/03/the-quad-what-it-is-and-what-it-is-not/>
- Leung, Maggie. (2021). “Indonesia, Australia Enhance Defence and Covid Response Cooperation”. Jakarta Globe. Diakses pada 4 Januari 2022. <https://jakartaglobe.id/news/indonesia-australia-enhance-defense-and-covid-response-cooperation>
- Leung, Wincy & Veronica Lin. (2016). “Face Off: Are Australia and New Zealand Part of Asia?”. Diakses pada 2 Januari 2021. <https://www.scmp.com/yp/discover/your-voice/opinion/article/3070011/face-are-australia-and-new-zealand-part-asia>
- Levy, Jack S. (2003). “Qualitative Methods in International Relations”, dalam Frank P. Harvey & Michael Brecher (ed), *Evaluating Methodology in International Studies*. Ann Arbor: The University of Michigan Press. 131.
- Lowy Institute. (2020). “Lowy Institute Poll”. <https://poll.lowyinstitute.org/charts/indonesia-and-democracy>
- Mackie, Jamie. (2007). *Australia and Indonesia: Current Problems, Future Prospects*. Lowy Institute for International Policy: Lowy Institute Paper.
- Nabbs-Keller, Greta. (2020). “Australia-Indonesia: An Uncertain World Makes for Firm Friends”. Diakses pada 11 Februari 2022. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/australia-indonesia-uncertain-world-makes-firm-friends>
- Nabbs-Keller, Greta. (2020). “Understanding Australia-Indonesia Relations in the Post-Authoritarian Era: Resilience and Respect”. *Australian Journal of International Affairs*, 74 (5). <https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1725423>
- Nurdin, Amin. (2009). *Pergulatan Kaum Muslim Minoritas Australia: Islam Versus Multikulturalisme dan Sekularisme*. Jakarta: Ushul Press.
- McDougall, Derek. (2018). “Australia’s 2017 Foreign Policy White Paper: Deconstruction and Critique”. *The Commonwealth Journal of International Affairs*, 107(3). <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00358533.2018.1476094>
- Parameswaran, Prashanth. (2020). “The Growing Indo-Pacific Dimension in Indonesia-Australia Relations”. The Diplomat. Diakses pada 11 Februari 2022. <https://thediplomat.com/2020/09/07/the-growing-indo-pacific-dimension-in-indonesia-australia-relations/>

- com/2020/02/indonesia- australia-relations-whats-in- the-growing-indo-pacific- dimension/  
Rahmawati, Iva. (2017). "Indonesian Public Diplomacy: Preserving State Existence through Sharing of Identities to Gain Mutual Understanding". *Jurnal Global dan Strategis*, 11(1).
- Stayner, Tom. (2022). "Australia's First Two Muslim Federal Ministers Say Symbolism Matter but Their Responsibility is to Deliver". SBS News. Diakses pada 22 Juli 2022. <https://www.sbs.com.au/news/article/australias-first-two-muslim-federal-ministers-say-symbolism-matters-but-their-responsibility-is-to-deliver/czrnu9stz>
- Strangio, Sebastian. (2021). "Australia, Indonesia Agree to Ramp Up Defense Relationship". *The Diplomat*. Diakses pada 4 Januari 2022. <https://thediplomat.com/2021/09/australia-indonesia-agree-to-ramp-up-defense-relationship/>
- Swasono, Sri-Edi. (2015). *Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi, Keberdaulatan, dan Kemandirian*. Yogyakarta: Ust Press.
- Tibi, Bassam. (2012). *Islam in Global Politics: Conflict and Cross-Civilizational Bridging*. New York: Routledge.
- Troath, Sian. (2019). "Bonded but Not Embedded: Trust in Australia-Indonesia Relations, Keating & Suharto to Turnbull & Jokowi". *Australian Journal of International Affairs*, 73(2), <https://doi.org/10.1080/10357718.2019.1583168>
- United Nations Development Programme. (2018). "UN Human Development Indices and Indicators Statistical Update". Diakses pada 2 Januari 2021. [http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018\\_human\\_development\\_statisticalupdate.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statisticalupdate.pdf)

**Copyright holder:**

Rizki Damayanti (2023)

**First publication right:**

[Andalas Journal of International Studies](#)

**This article is licensed under:**

